



Argumen Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam (Sebuah Interpretasi)

Ardiansyah¹, Minnah El Widdah², Su'aidi³,

SMA Negeri 1 Bungo Provinsi Jambi¹, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi^{1,2-3},

Email Korespondensi: ardieoakaylaassyifa@gmail.com

Article received: 10 Maret 2024, Review process: 25 Maret 2024,

Article Accepted: 15 April 2024, Article published: 15 Mei 2024

ABSTRACT

Islamic education is one step in preparing Islamic scientists. The aim of this research is to analyze and describe Islamic education policy arguments. This research method uses a library study approach, namely research carried out without a research location, where all data is taken through previous studies in the form of books and scientific articles that are relevant to the research theme. The data collection technique in this research uses documentation, with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research can be described firstly, improving educational infrastructure is very important to create a conducive and attractive learning environment for students. and continuous training and development for teaching staff is the key to improving the quality of learning and keeping up with the latest developments in education. Second, teacher empowerment programs through welfare facilities and advanced training can increase teacher motivation and performance, as well as strengthen their role in the educational process. and regular evaluation and refinement of the curriculum is necessary to ensure relevance to current developments and student needs. Third, increasing public participation in education policy development can bring significant financial and moral support.

Keywords: Arguments, Islamic Education Policy.

ABSTRAK

Pendidikan islam merupakan salah satu langkah dalam mempersiapkan ilmuan-ilmuan islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan argumen kebijakan pendidikan islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan tanpa lokasi penelitian, dimana seluruh data diambil melalui kajian terdahulu berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, dengan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat dideskripsikan pertama, peningkatan infrastruktur pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan menarik bagi siswa. dan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi tenaga pendidik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan. Kedua, program pemberdayaan guru melalui fasilitas kesejahteraan dan pelatihan lanjutan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru, serta memperkuat peran mereka dalam proses pendidikan. dan evaluasi dan

penyempurnaan kurikulum secara berkala diperlukan untuk memastikan relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan pendidikan dapat membawa dukungan finansial dan moral yang signifikan.

Kata Kunci: *Argumen, Kebijakan Pendidikan Islam.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi kemajuan bangsa dan negara (Dian et al., 2023). Pendidikan sangat penting bagi manusia untuk berkembang, pendidikan adalah penanaman potensi manusia yang disengaja melalui cara formal atau informal yang diterima secara umum oleh masyarakat luas (Usman et al., 2023). Refleksi dari kompleksitas serta dinamika pendidikan Islam di Indonesia (Maimunah et al., 2023). pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan (Getar et al., 2023). Pendidikan didalamnya banyak aktivitas yang berhubungan antara manusia dengan manusia (Hasan et al., 2023). Pendidikan merupakan salah satu usaha meningkatkan kualitas hidup manusia (Saidin et al., 2023). Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkan kembangkan potensi sumber daya manusia (Nidia & Iskandar, 2023). Pendidikan saat ini telah mengalami pemutkhiran (Indra & Syahrizal, 2023). Pendidikan Islam memegang peran yang sangat penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas (Ardiansyah et al., 2023).

Pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moralitas individu, serta membangun fondasi spiritual dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam menjadi landasan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. Keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk pandangan hidup dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Pendidikan Islam memiliki peran utama dalam membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui kurikulum yang tepat dan pendekatan yang holistik, kebijakan pendidikan Islam dapat memberikan landasan moral yang kokoh bagi generasi muda.

Kebijakan pendidikan Islam juga berperan dalam memelihara identitas keislaman dalam tengah-tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan, negara dapat menjaga keberlanjutan budaya dan identitas keagamaan masyarakatnya. Pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan pengembangan individu, tetapi juga kontribusi pada pembangunan masyarakat yang berbasis nilai. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, masyarakat dapat bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Pengembangan kebijakan pendidikan Islam seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya finansial. Kurangnya anggaran dapat membatasi implementasi program-program pendidikan Islam yang lebih berkualitas.

Kemajuan teknologi dan modernisasi seringkali menciptakan tantangan dalam memadukan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Penting untuk mengembangkan kebijakan yang dapat menjembatani kesenjangan antara nilai-

nilai tradisional dan kebutuhan modern. Terkadang, ketidakjelasan dalam kurikulum pendidikan Islam dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penyampaian materi ajaran Islam. Perlu adanya kebijakan yang mendukung penyusunan kurikulum yang relevan dan berkelanjutan.

Beberapa wilayah mengalami konflik, yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan Islam. Kebijakan perlu diformulasikan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik di daerah tersebut. Dengan memahami kompleksitas tantangan dan pentingnya kebijakan pendidikan Islam, analisis mendalam perlu dilakukan untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemahaman ini menjadi dasar untuk merumuskan argumen pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang berkelanjutan dan relevan. Dengan tujuan penelitian untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan pendidikan Islam yang telah ada dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan Islam, seperti pembentukan karakter Islami dan pemeliharaan identitas keislaman dan menganalisis tantangan integrasi nilai-nilai Islam dengan perkembangan teknologi dan modernisasi, dan merumuskan strategi kebijakan yang dapat meminimalkan konflik antara nilai tradisional dan kemajuan teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelusuran dan penelitian dengan metode membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dalam menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan proseding ilmiah. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dengan melakukan literature review pada buku, artikel jurnal ilmiah dan beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan argumen kebijakan pendidikan islam, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam.

a. Identifikasi Stakeholder.

Stakeholder dalam proses kebijakan pendidikan Islam melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dan peran krusial dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Berikut adalah identifikasi stakeholder utama beserta peran; (1) Pemerintah Pusat Dan Daerah, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam dan mengelolanya baik di tingkat pusat maupun daerah. Keputusan kebijakan, alokasi anggaran, dan penetapan standar pendidikan Islam menjadi wewenangnya. Pengaruh perannya yaitu menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran serta

membentuk regulasi dan standar pendidikan Islam (Al-Attas, S. N. 1993). (2) Kementerian Agama, kementerian Agama memiliki fokus khusus dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Mereka terlibat dalam penyusunan kurikulum, pengembangan tenaga pendidik, serta pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pengaruh perannya yaitu mengembangkan kurikulum dan materi ajar serta melaksanakan pelatihan untuk tenaga pendidik (Hamzah, H. 2010). (3) Lembaga pendidikan Islam, Lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti sekolah-sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, merupakan pelaksana utama kebijakan. Mereka mengimplementasikan kurikulum, melibatkan tenaga pendidik, dan memastikan kualitas pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengaruh perannya yaitu mengimplementasikan kurikulum dan standar pendidikan serta menyediakan lingkungan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Asy-Syathibi, I. I. 2011). (4) Masyarakat dan orang tua. Masyarakat, terutama orang tua siswa, memiliki peran dalam memberikan dukungan dan partisipasi dalam kebijakan pendidikan Islam. Mereka juga dapat memberikan masukan dan umpan balik terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Pengaruh perannya yaitu memberikan dukungan dan partisipasi dalam kegiatan pendidikan serta memberikan umpan balik dan melibatkan diri dalam pengambilan keputusan (Al-Qurtubi, A. I. 2004). (5) Organisasi keagamaan dan pemikir Islam. Organisasi-organisasi keagamaan dan pemikir Islam memiliki peran dalam memberikan pandangan dan saran terkait kebijakan pendidikan Islam. Mereka dapat membantu dalam mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengaruh perannya yaitu memberikan pandangan dan saran keagamaan terkait kebijakan pendidikan serta mendorong implementasi kebijakan yang sejalan dengan ajaran Islam (Al-Qurtubi, A. I. 2004).

Stakeholder dalam kebijakan pendidikan Islam memiliki peran masing-masing yang saling terkait. Pemerintah, kementerian agama, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi keagamaan bekerja sama untuk membentuk kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, melibatkan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara keseluruhan. Evaluasi dan keterlibatan aktif dari semua stakeholder diperlukan untuk mengoptimalkan dampak kebijakan pendidikan Islam.

b. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Islam

Analisis SWOT; (1) Kekuatan (Strengths), **Dasar ajaran agama yang kuat.**

Kebijakan pendidikan Islam memiliki dasar ajaran agama yang kuat, menciptakan landasan yang kokoh untuk pembentukan karakter dan nilai-nilai moral (Al-Qurtubi, A. I. 2004). **Partisipasi dan dukungan pemerintah.** Pemerintah mendukung kebijakan pendidikan Islam, tercermin dalam alokasi anggaran, regulasi, dan dukungan kelembagaan (Hamzah, H. 2010). (2) Kelemahan (Weaknesses). Kurangnya responsivitas terhadap perkembangan zaman. Kebijakan pendidikan Islam mungkin kurang responsif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi (Al-Qurtubi, A. I. 2004). Keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Beberapa lembaga pendidikan Islam mungkin mengalami keterbatasan

sumber daya, termasuk fasilitas fisik dan keuangan (Asy-Syathibi, I. I. 2011). (3) Peluang (Opportunities). Peningkatan integrasi teknologi. Peluang untuk meningkatkan integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan Islam, memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif (Al-Attas, S. N. 1993). Peningkatan kerjasama antar lembaga dan internasional. Peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan antarlembaga dalam rangka pertukaran pengalaman dan sumber daya (Al-Attas, S. N. 1993). (4) Ancaman (Threats). Tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Ancaman terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan Islam dapat muncul dari kesulitan implementasi di lapangan, terutama dalam wilayah konflik (Hamzah, H. 2010). Perubahan kebijakan pemerintah. Ancaman dari perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan fokus program pendidikan Islam (Al-Attas, S. N. 1993).

Analisis SWOT kebijakan pendidikan Islam mengidentifikasi bahwa kebijakan ini memiliki dasar ajaran agama yang kuat dan mendapatkan dukungan pemerintah, namun menghadapi tantangan responsivitas terhadap perkembangan zaman dan keterbatasan sumber daya. Peluang untuk meningkatkan integrasi teknologi dan kerjasama internasional dapat menjadi langkah positif, tetapi tetap harus berhati-hati terhadap tantangan implementasi dan perubahan kebijakan pemerintah. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang mungkin timbul.

c. Analisis Cost-Benefit Kebijakan Pendidikan Islam

Analisis cost benefit kebijakan pendidikan islam; (1) Analisis biaya (Cost), Infrastruktur dan fasilitas. Biaya finansial: Pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur pendidikan Islam, seperti pembangunan gedung, perpustakaan, dan laboratorium. Biaya non finansial: Potensial gangguan dan ketidaknyamanan selama konstruksi. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan membutuhkan investasi finansial yang signifikan. Proses konstruksi dapat menimbulkan ketidaknyamanan sementara bagi siswa, guru, dan masyarakat sekitar (Al-Qurtubi, A. I. 2004). Peningkatan kualitas pengajaran. Biaya finansial: Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, pengadaan bahan ajar, dan penerapan metode pengajaran inovatif. Biaya non finansial : Waktu dan usaha yang diperlukan untuk penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran. Peningkatan kualitas pengajaran memerlukan investasi dalam pelatihan guru dan pengembangan metode pengajaran. Proses penyesuaian kurikulum membutuhkan waktu dan upaya (Hamzah, H. 2010). Pemberdayaan guru. Biaya finansial : Program pelatihan dan pengembangan karir, serta peningkatan fasilitas kesejahteraan guru. Biaya non finansial : Perubahan dalam tugas dan tanggung jawab guru. Pemberdayaan guru melalui pelatihan dan peningkatan fasilitas dapat membawa manfaat jangka panjang, tetapi memerlukan pengeluaran finansial dan perubahan dalam tugas guru (Al-Attas, S. N. 1993). (2) Manfaat (Benefit). Peningkatan kualitas pendidikan. Manfaat finansial : Peningkatan taraf pendidikan dapat menghasilkan masyarakat yang lebih terdidik, yang pada

gilirannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi. Manfaat non finansial : Peningkatan moral dan etika di kalangan siswa. Manfaat finansial mencakup kontribusi positif siswa terhadap ekonomi, sementara manfaat non-finansial melibatkan peningkatan moral dan etika di kalangan siswa (Asy-Syathibi, I. I. 2011). Peningkatan kompetensi siswa. Manfaat finansial: Siswa yang lebih kompeten cenderung memiliki peluang lebih besar untuk sukses di dunia kerja. Manfaat non finansial : Peningkatan rasa percaya diri dan kemandirian siswa. Peningkatan kompetensi siswa dapat mengarah pada kesempatan kerja yang lebih baik, yang memiliki manfaat finansial jangka panjang (Al-Attas, S. N. 1993). Dukungan masyarakat. Manfaat finansial : Dukungan masyarakat dapat menghasilkan donasi dan dana tambahan. Manfaat non finansial : Peningkatan hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Dukungan masyarakat dapat menghasilkan dukungan finansial tambahan, dan peningkatan hubungan dapat membawa manfaat non-finansial berupa integrasi yang lebih baik antara lembaga pendidikan dan masyarakat (Al-Attas, S. N. 1993). (3) Implikasi finansial dan non finansial. Implikasi finansial. Positif : peningkatan ekonomi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peluang pekerjaan yang lebih baik. Negatif : beban anggaran pemerintah dalam mendanai proyek infrastruktur dan program pelatihan. Meskipun ada potensi peningkatan ekonomi, implementasi kebijakan memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, yang dapat menjadi beban untuk pemerintah (Hamzah, H. 2010). Implikasi non finansial. Positif : Peningkatan kualitas hidup, moral, dan etika dalam masyarakat. Negatif : Potensial resistensi terhadap perubahan dari pihak yang mungkin merasa terancam. Meskipun ada potensi untuk peningkatan kualitas hidup dan moral, perubahan dapat dihadapi dengan resistensi dari pihak yang merasa terancam atau tidak setuju (Al-Attas, S. N. 1993).

Analisis cost-benefit kebijakan pendidikan Islam menyoroti kompleksitas kebijakan ini dari dua aspek, yaitu biaya dan manfaat. Peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan guru membawa manfaat finansial dan non-finansial jangka panjang, sementara infrastruktur dan perubahan kurikulum memerlukan investasi finansial yang signifikan. Implikasi finansial dan non-finansial harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif yang seimbang dalam jangka panjang. Dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan finansial dan non-finansial yang mungkin muncul.

d. Kebijakan pendidikan islam dan dampaknya

Kebijakan berasal dari kata bijak yang mengandung arti; pertama, kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; kedua, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran dan atau garis haluan (Mukti, 2019). Kebijakan dalam bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut "Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan". Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat

membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting (Sumarto, 2017).

Menurut Lasswell dikutip Muh. Abdul Mukti, kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices). Berikutnya menurut Anderson dikutip Muh. Abdul Mukti, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a purposive course of problem or matter of concern). Selanjutnya menurut Friedrik dikutip Muh. Abdul Mukti, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan (Mukti, 2019).

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit (Mukti, 2019).

Kebijakan merupakan tindakan politik yang dilakukan secara sengaja dengan pemikiran matang dan hati-hati oleh sejumlah pejabat, organisasi, dan instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dan menghasilkan keputusan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternative kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Semua bidang kehidupan mempunyai kebijakannya masing-masing untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan pembatasan perilaku, sehingga mempunyai arah yang jelas dalam melangkah ke masa depan. Kebijakan tersebut tidak terkecuali juga ada pada bidang pendidikan Islam yang sering disebut dengan kebijakan pendidikan (Islamic educational policy) (Rohman & Anis, 2023). Kebijakan pendidikan Islam dilatarbelakangi oleh adanya masalah dalam bidang pendidikan. Masalah kebijakan pendidikan Islam muncul ketika adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan kenyataan penyelenggaraan pendidikan. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis penyelenggaraan pendidikan dengan menjabarkan visi dan misi pendidikan guna mencapai terwujudnya tujuan pendidikan yang dibuat dalam kurun waktu tertentu. Margaret Goertz dikutip Rohman dan Anis Fauzi, mengatakan bahwa kebijakan pendidikan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan (Rohman & Anis, 2023).

Rohman dan Anis Fauzi, merumuskan kebijakan pendidikan harus menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan. Menentukan rencana-rencana kebijakan pendidikan harus juga mengkaitkannya dengan anggaran pendidikan. Sebab anggaran pendidikan sangat menentukan tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan (Rohman & Anis, 2023).

Charles O. Jones dikutip Rohman dan Anis Fauzi, mengemukakan sebuah kebijakan pendidikan mencakup lima komponen, yaitu; (1) Tujuan (goal) Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan biasanya dibuat sebagai langkah awal dalam pembuatan suatu rencana kegiatan atau program. Dalam suatu kegiatan dibutuhkan juga tujuan sebagai salah satu komponennya. Kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam kebijakan pendidikan juga harus rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. (2) Rencana (plans) Setelah menentukan tujuan kebijakan pendidikan yang ingin dicapai, selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat rencana kerja yang memuat secara spesifik operasional kerja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana kerja dibuat untuk mengatur manajemen kerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan sehingga arah pelaksana kebijakannya jelas dan terarah. (3) Program (programme) Langkah ketiga adalah pembuatan program. Program merupakan proyek nyata dari tujuan yang telah disusun sebelumnya. Program dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan dengan melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan. Program yang dimaksudkan disini adalah kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi bidang pendidikan. Dalam membuat suatu kebijakan pendidikan sebaiknya dibuat lebih dari satu atau dengan membuat beberapa pilihan alternatif kebijakan pendidikan agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. (4) Keputusan (Decision) Keputusan (decision) adalah segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana program, melaksanakan program dan mengevaluasi program. Keputusan diambil dengan memperhatikan hasil ujicoba dari beberapa alternatif kebijakan pendidikan yang telah dilakukan. Hasil rasionalitas, tingkat kepuasan dan dapat diterimanyakebijakan pendidikan oleh semua pihak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan pendidikan untuk ditetapkan dan diimplementasikan. (5) Dampak (effects) Dampak (effects) merupakan dampak dari program yang telah dilaksanakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik program primer maupun sekunder. Dalam penetapan suatu kebijakan pendidikan tidak dipungkiran pasti akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Kelima komponen di atas digunakan untuk mewujudkan terjadinya suatu kebijakan. Tanpa kelima komponen tersebut suatu kebijakan

tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Kelima komponen saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung pembuatan suatu kebijakan khusus kebijakan dalam bidang pendidikan (Rohman & Anis, 2023).

Analisis kebijakan perlu memiliki kecakapan-kecakapan sebagai berikut; (1) mampu cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral. (2) mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin, jika pun tidak, mampu mengakses kepada sumber pengetahuan di luar disiplin yang dikuasainya. (3) mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil. (4) mampu menghindari pendekatan toolbox (atau textbook) untuk menganalisis kebijakan, melainkan mampu menggunakan metode yang paling sederhana namun tepat dan menggunakan logika untuk mendesain metode jika metode yang dikehendaki memang tidak tersedia. (5) mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu mengemukakan dengan angka. (6) mampu membuat rumusan masalah yang sederhana namun jelas, memeriksa fakta-fakta yang diperlukan, meletakkan diri pada posisi orang lain (empati), khususnya sebagai pengambil kebijakan dan publik yang menjadi konstituennya dan mampu untuk menahan diri hanya untuk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan. (7) mampu tidak saja mengatakan “ya” atau “tidak” pada usulan yang masuk, namun juga mampu memberikan definisi dan analisa dari usulan tersebut, mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional dan sama sekali komplit. 8. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan public dan mempunyai etika profesi yang tinggi.

Pengertian kebijakan menurut para ahli adalah sebagai berikut: (1) Menurut Lasswell, kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices). (2) Menurut Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a purposive corse of problem or matter of concern). (3) Menurut Friedrik, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan (Ali Imron, 2002).

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit (Muh. Abdul Mukti, 2019).

Pendidikan merupakan proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien (Soleha dan Rada, 2012). Pendidikan yang baik seharusnya berorientasi kemasa yang akan datang, sebab peserta didik sekarang merupakan gambaran bangsa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan diharapkan mampu menjadikan peserta didik siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan hidup kedepannya. Selaras dengan pengertian tersebut pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Soleha dan Rada, 2012). Maka dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses belajar yang terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, mengembangkan potensi peserta didik semaksimal dan sebaik mungkin agar bisa mengatasi segala tantangan zaman (Saihu, 2019).

Berikut pengertian pendidikan menurut para ahli adalah sebagai berikut: (1) Muhammad Muzmil al-Basyir dalam kitabnya *Madkhal ila al-Manahij wathuruq altadris* berpendapat "Pendidikan adalah proses menyesuaikan pembelajaran untuk mengubah tingkah laku (Prilaku) peserta didik terhadap tujuan spesifik yang diinginkan". (Muhammad Muzmil al-Basyir dan Muhammad Malik Muhammad Sa'id, 1995). (2) Muhammad Athiyah al-Abrasy dalam kitabnya *Ruh al-Tarbiyah Wa al-Ta'lim* juga berpendapat "Pendidikan adalah mempersiapkan seorang (peserta didik) supaya ia dapat hidup dengan sempurna, bahagia, cinta kepada tanah airnya, kuat jasmaninya, sempurna budi pekertinya, sistematis pemikirannya, halus perasaannya, cakap dalam karyanya, mampu bekerjasama dengan orang lain, indah ungkapannya, indah dalam tulisannya serta mampu melakukan pekerjaan dengan baik (Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 1989). Adapun pengertian pendidikan islam tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pendidikan nasional. Pendidikan islam adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan seluruh potensi manusia sesuai dengan fitrahnya agar berkembang secara optimal menuju kedewasaan sehingga mampu menjadikan manusia sebagai Abdullah dan khalifatullah fi al-ardh (Andi Prastowo, 2014).

Pengertian pendidikan Islam menurut Abdurrahman al-Nahlawi dalam kitabnya *Ushul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa asaliha* adalah "Pendidikan Islam adalah pengembangan pemikiran manusia dan pengorganisasian prilaku dan emosi berdasarkan agama islam dengan tujuan untuk mencapai hakikat nilai keislaman dalam kehidupan individu, masyarakat di segala bidang kehidupan" (Abdurrahman An-Nahlawi, 1999).

Berikut beberapa pengertian pendidikan Islam menurut para ahli: (1) Fadhil al-Jamaly memandang pendidikan islam sebagai upaya dalam mengembangkan dan mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia sehingga terbentuk

pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan. (2) H. M. Chabib Thoha menjelaskan bahwa pendidikan islam sebagai proses pemeliharaan dan penguatan sifat dan potensi insaniyah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran ilmiah atau kreatif, dalam rangka menegakkan kebenaran di muka bumi. (3) Yusuf al-Qardhawy, Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam peran serta menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan manis dan pahitnya (Abd Muid N, Rizka Arfeinia,2012).

Melihat definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat diketahui bahwa pendidikan islam merupakan segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial untuk mengarahkan potensi, baik potensi dasar maupun potensi ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih lagi diakhirat kelak.

Kebijakan Pendidikan Islam berdasarkan penjelasan para ahli di atas adalah serangkaian segala upaya tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah, membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat kelak.

Pelaksanaan pendidikan Islam sangat banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam telah menyerukan adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam pembelajaran, sehingga terbukalah jalan yang mudah untuk belajar bagi semua orang. Pintu masjid dan isntitut terbuka untuk semuanya, tanpa adanya perbedaan antara sikaya dan simiskin, tinggi atau rendahnya kedudukan seorang siswa. Tidak ada kelebihan orang arab atau bukan Arab yang membedakan hanya ketaqwaannya semata. Bahkan pada masa Rasulullah saw pendidikan islam dilaksanakan dengan Cuma-Cuma (gratis), dalam penerimaan siswa baru tidak disyaratkan kepada batas umur tertentu, ijazah, nilai angka-angka ujian ataupun aturan-aturan khusus. Bila seseorang memiliki keinginan untuk belajar dan cinta ilmu, kegairahan untuk untuk mengadakan penelitian dan pembahasan, apalagi jika orang tersebut memiliki kecerdasan, itu semua terbuka luas bagi semua orang (Muhammad Athijah al-Abrasy, 1970).

Sejarah kebijakan pendidikan islam tidak dapat dipisahkan atau erat kaitannya dengan kebijakan Politik Pendidikan suatu negara atau pemerintah yang memiliki sistem pendidikan nasional. Demikian pula di Indonesia tersirat dan tersurat dalam keseluruhan isi, jiwa dan semangat undang-undang Sistem Pendidikan nasional (UU Sisdiknas) (A. Malik fajar, 2017). Menurut Abuddin Nata dalam bukunya Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan islam di Indonesia, Politik Pendidikan adalah: "Segala usaha, kebijakan dan siasat yang

berkaitan dalam masalah pendidikan". Dengan demikian Politik Pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara (Abuddin Nata, 2020).

Sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan, maka dampaknya sangat signifikan dan menimbulkan keadaan pendidikan Islam secara umum jauh lebih baik dari keadaan pendidikan sebelumnya. Diantara dampak dari kebijakan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh abuddin Nata dalam bukunya Sejarah pendidikan Islam sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan nasional (Abuddin Nata, 2016). Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk Pesantren, ma'had 'Ali, Raudhatul athfal dan majelis ta'lim. Demikian pula Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur Guru dan Dosen dibawah Kementrian Pendidikan Nasional saja, namun juga mengatur Guru dan Dosen dibawah Kementrian Agama (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2003).
- b. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan ang bernaung dibawah Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional.
- c. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP/2006) melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran (subject matter) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut. Selain itu pada kurikulum KBK dan KTSP tersebut, setiap satuan pendidikan memiliki peluang yang luas untuk merekonstruksi kurikulum sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah baik Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah ini, selain para siswanya memperoleh pelajaran

- umum namun juga mendapatkan pelajaran agama. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat nanti madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.
- e. Kebijakan program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan Pertama (SMP/Madrasah Tsanawiyah). Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anakanak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan seluruh keluarga yang kurang mampu. Mereka tidak dipungut biaya operasional pendidikan, karena kepala sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS.
 - f. Kebijakan tentang penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada pelanggan (To give good service and satisfaction for all costumers) sebagaimana yang terdapat dalam konsep Total quality Management (TQM). Penerapan Total quality Management (TQM) tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang perdagangkan. Agar komoditas tersebut menarik minat dan memuaskan pelanggan, maka komodits tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu seluruh komponen pendidikan harus dilakukan standarisasi, dan standar tersebut harus dikerjakan dengan sumber daya manusia yang unggul.
- Berkaitan dengan hal itu maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi: (1) Standar isi (Kurikulum) (2) Standar Mutu Lulusan (3) Standar Proses Pembelajaran (4) Standar Pendidik dan Kependidikan (5) Standar Pengelolaan (6) Standar sarana dan Prasarana (7) Standar Pembiayaan (8) Standar Penilaian.

2. **Argument Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam.**

a. **Rancangan Kebijakan Baru**

Rancangan Kebijakan Baru pada peningkatan kualitas pendidikan Islam; (1) Infrastruktur dan fasilitas, Elemen kebijakan baru dengan melakukan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan Islam, termasuk pembangunan gedung, perpustakaan, dan laboratorium, karena Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik. Fasilitas yang baik dapat meningkatkan daya tarik lembaga pendidikan, menarik siswa untuk mendaftar dan tetap berada di institusi tersebut. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan adalah langkah krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pembangunan gedung, perpustakaan, dan laboratorium yang memadai meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran (Al-Qurtubi, A. I. 2004). (2) Peningkatan kualitas

pengajaran. Elemen kebijakan baru dengan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan dan metode pengajaran tenaga pendidik. Guru yang terampil dan terlatih dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh kepada siswa. Pelatihan berkelanjutan membantu guru beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam metode pengajaran dan teknologi pendidikan. Peningkatan kualitas pengajaran adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Pelatihan terus-menerus mendukung guru dalam meningkatkan metode pengajaran mereka dan memastikan bahwa mereka dapat mengatasi perkembangan terkini dalam pendidikan (Hamzah, H. 2010). (3) Pemberdayaan guru. Elemen kebijakan baru dengan menerapkan program pemberdayaan guru melalui peningkatan fasilitas kesejahteraan, pelatihan lanjutan, dan penghargaan atas kinerja. Guru yang merasa dihargai dan memiliki fasilitas kesejahteraan yang baik cenderung lebih termotivasi dan berkinerja tinggi. Pemberdayaan guru dapat mengaktifkan peran mereka dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Pemberdayaan guru melalui peningkatan fasilitas kesejahteraan, pelatihan lanjutan, dan penghargaan akan membantu meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Guru yang berdaya dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Al-Attas, S. N. 1993). (4) Penyempurnaan kurikulum. Elemen kebijakan baru dengan evaluasi dan penyempurnaan berkala terhadap kurikulum pendidikan Islam untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini. Kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dan tuntutan zaman dapat meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja. Kurikulum yang terus diperbaharui mendukung pengembangan komprehensif siswa dalam aspek akademis, sosial, dan karakter. Penyempurnaan kurikulum merupakan langkah krusial untuk menjaga relevansi pendidikan Islam dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Kurikulum yang berkualitas mendukung pengembangan karakter dan keterampilan siswa (Asy-Syathibi, I. I. 2011). (5) Partisipasi masyarakat. Elemen kebijakan baru dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan dukungan terhadap program pendidikan Islam. Partisipasi masyarakat dapat membawa dukungan finansial tambahan dan memberikan kontribusi positif terhadap atmosfer pendidikan. Meningkatkan hubungan antara masyarakat dan lembaga pendidikan dapat menciptakan ikatan yang kuat dan berkelanjutan. Dukungan masyarakat adalah faktor penting untuk keberhasilan kebijakan pendidikan Islam. Partisipasi aktif dan dukungan finansial membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan pendidikan (Asy-Syathibi, I. I. 2011).

Rancangan kebijakan baru ini menargetkan perbaikan holistik dalam kualitas pendidikan Islam dengan fokus pada infrastruktur, kualitas pengajaran, pemberdayaan guru, penyempurnaan kurikulum, dan partisipasi masyarakat. Setiap elemen kebijakan didasarkan pada analisis kebijakan pendidikan Islam sebelumnya dan bertujuan untuk merespons tantangan serta peluang yang teridentifikasi. Implementasi rancangan kebijakan ini diharapkan dapat membawa

dampak positif dalam jangka panjang terhadap mutu pendidikan Islam dan kontribusi siswa terhadap masyarakat dan dunia kerja.

b. Rekomendasi untuk Penerapan Kebijakan Pendidikan Islam

Rekomendasi untuk penerapan kebijakan pendidikan islam; (1) Integrasi teknologi pendidikan. Rekomendasi kebijakan dengan mengintegrasikan teknologi pendidikan dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Integrasi teknologi membantu siswa memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja digital. Penerapan teknologi pendidikan akan meningkatkan efektivitas pengajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan era digital. (2) Pengembangan program ekstrakurikuler. Rekomendasi kebijakan dengan mendorong pengembangan program ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan siswa. Program ekstrakurikuler dapat membantu mengembangkan aspek holistik siswa, termasuk karakter dan kreativitas. Memberikan siswa peluang untuk mengeksplorasi bakat dan minat mereka di luar kurikulum akademis. Program ekstrakurikuler dapat menjadi wahana untuk membentuk karakter siswa dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih luas (Al-Attas, S. N. 1993). (2) Peningkatan keterlibatan orang tua. Rekomendasi kebijakan dengan mendorong partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka melalui program, pertemuan, dan kegiatan sekolah. Partisipasi orang tua meningkatkan dukungan lingkungan keluarga terhadap pendidikan anak. Orang tua yang terlibat dapat memonitor dan mendukung kemajuan pendidikan anak secara lebih efektif. Keterlibatan orang tua adalah faktor kunci dalam kesuksesan pendidikan siswa, dan kebijakan ini dapat meningkatkan hubungan antara sekolah dan keluarga (Epstein, J. L. 2018). (3) Penguatan pendidikan karakter. Rekomendasi kebijakan dengan mengintegrasikan pendidikan karakter Islam dalam kurikulum, dengan fokus pada nilai-nilai moral dan etika. Alasan karena mengintegrasikan pendidikan karakter Islam dalam kurikulum, dengan fokus pada nilai-nilai moral dan etika, serta pendidikan karakter Islam membentuk siswa menjadi individu yang berakhlak baik dan bermoral. Pendidikan karakter sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang dijunjung tinggi. Penguatan pendidikan karakter mengarah pada pembentukan individu yang berintegritas dan memahami nilai-nilai moral dalam konteks Islam (Mulyasa, E. 2013). (4) Peningkatan fasilitas penelitian dan inovasi. Rekomendasi kebijakan dengan Meningkatkan fasilitas penelitian dan inovasi untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan kreativitas di lingkungan pendidikan Islam. Alasan karena fasilitas penelitian mendukung pengembangan pendidikan yang berbasis pada pengetahuan dan inovasi, dan keberadaan fasilitas penelitian dapat meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam di tingkat nasional dan internasional. Investasi dalam fasilitas penelitian dan inovasi akan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas pendidikan (Creswell, J. W. 2014).

c. Saran untuk Mengatasi Potensi Hambatan

Beberapa saran menurut untuk mengatasi hambatan penerapan kebijakan pendidikan islam : (1) Dukungan keuangan. Memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung penerapan kebijakan baru, karena Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan dukungan finansial yang cukup untuk pembangunan fasilitas, pelatihan guru, dan pengembangan program ekstrakurikuler. (2) Pelatihan dan orientasi. Menyediakan pelatihan dan orientasi kepada tenaga pendidik dan orang tua untuk memahami dan mendukung perubahan kebijakan, karena persiapan yang baik dan pemahaman mendalam tentang kebijakan baru dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan pelaksanaan yang efektif. (3) Komunikasi efektif. Membangun mekanisme komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya, karena Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu menghindari miskomunikasi dan membangun dukungan yang lebih luas untuk kebijakan. (4) Evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan untuk mengevaluasi dampak dan mengidentifikasi area perbaikan, karena evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan dapat diadjust jika diperlukan. (5) Partisipasi aktif stakeholder. Melibatkan aktif semua stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, karena partisipasi aktif dari semua pihak terkait meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap kebijakan (Epstein, J. L. 2018).

Rekomendasi ini menawarkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan mengintegrasikan teknologi, mengembangkan program ekstrakurikuler, meningkatkan keterlibatan orang tua, memperkuat pendidikan karakter, dan meningkatkan fasilitas penelitian. Saran untuk mengatasi potensi hambatan termasuk dukungan keuangan yang memadai, pelatihan dan orientasi, komunikasi efektif, evaluasi berkala, dan partisipasi aktif stakeholder. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam.

SIMPULAN

Dalam menjalankan analisis kebijakan pendidikan Islam dengan fokus pada Argumen pengembangan kebijakan pendidikan Islam, berikut ringkasan temuan yang signifikan (1) Infrastruktur dan fasilitas, Peningkatan infrastruktur pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan menarik bagi siswa. (2) Peningkatan kualitas pengajaran, Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi tenaga pendidik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan. (3) Pemberdayaan guru, Program pemberdayaan guru melalui fasilitas kesejahteraan dan pelatihan lanjutan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru, serta memperkuat peran mereka dalam proses pendidikan. (4) Penyempurnaan kurikulum. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum secara berkala diperlukan untuk memastikan relevansi dengan perkembangan zaman

dan kebutuhan siswa. (5) Partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan pendidikan dapat membawa dukungan finansial dan moral yang signifikan.

Kontribusi penelitian ini terhadap Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam dengan cara; (1) Solusi konkret, Menyajikan solusi konkret dan terukur untuk meningkatkan aspek-aspek kritis dalam pendidikan Islam, mengarah pada pengembangan yang holistik. (2) Integrasi nilai islam, Menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap rekomendasi kebijakan, menjadikan kebijakan yang dihasilkan konsisten dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. (3) Fokus pada kualitas, Memberikan fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan Islam melalui perbaikan infrastruktur, pengajaran, pemberdayaan guru, kurikulum, dan partisipasi masyarakat

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, Maisah, & Lukman, H. (2023). Analisis SWOT dan Pemetaan Strategi Lembaga Pendidikan Islam (Studi di SMAN 1 Bungo Provinsi Jambi). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 39–58.
- Dian, K., Maisah, & Lukman, H. (2023). Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan (Studi di MTsN 3 Tulungagung, Jambi). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 83–98.
- Getar, R. P., Su'aidi, & Minnah, E. W. (2023). Meramalkan Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Memperkuat Penanaman Nilai-Nilai Islam Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 59–70.
- Hasan, S., Iskandar, & Martinis, Y. (2023). Perspektif Psikologi Pendidikan Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 1–9.
- Indra, W. F. F., & Syahrizal, H. (2023). Digitalisasi Lembaga Pendidikan dalam Menghadapi Perkembangan dan Kemajuan Teknologi Informasi Dunia Pendidikan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 26–38.
- Maimunah, P. H. H., Minnah, E. W., & Su'aidi. (2023). Proses Membuat Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 99–108.
- Mukti, M. A. (2019). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan*, 3(2), 419.
- Nidia, S., & Iskandar. (2023). Kontribusi Psikologi Dalam Manajemen Pengelolaan Kelas. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 18–25.
- Rohman, & Anis, F. (2023). Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal Indopedia (Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan)*, 1(2), 253.
- Saidin, Maisah, & Lukman, H. (2023). Urgensi Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 10–17.
- Sumarto. (2017). Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *THAQAFIYYAT*, 18(1), 109.
- Usman, F., Dwi, G. A. P., M.Fadhil, & M.Yudha. (2023). Strategi Guru Al-Qur'an

Hadist Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di MTS Qiro'atul Qur'an Sungai Binjai. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 9-23.